

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2013**

OLEH:

HOUDSON MARGANDA NAPITUPULU

(houdsonjunior@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dadang Mashur, S.Sos., M.Si.,

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 288293 –
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Musrenbang Senapelan Subdistrict is a form of consultative forums or negotiations among stakeholders in a sub-district to discuss and agree on the steps of handling program priority activities listed in the proposed plans for village development activities / village which is integrated with the development priorities of the district / city in the Subdistrict Senapelan. However, sebagaimana known, that of every usula development proposed by the community to the government, not all where it can be realized. There is a proposal that should be considered to be realized in the current fiscal year, or be made a priority paa years to come. As the proposal Musrenbang in 2012, of eleven priority proposals, only 4 proposals that can be realized in Senapelan Subdistrict, the city of Pekanbaru.

The theory used in this study is the effectiveness of the plan according to Nugroho and Wrihatmolo, who explained that in preparing a plan, there are four things that must be considered, namely the systematic, integrated, Transparency, and Accountability. This study uses qualitative research methods, and assessment data used is data triangulation technique. Where in collecting the data, the authors conducted interviews and observations in the field related to Musrenbang Senapelan District.

The results of this study indicate that in the process of planning, has been conducted in accordance with applicable SOP's Musrenbang Subdistrict, and factors that affect effectiveness of Musrenbang Senapelan Subdistrict include the community, clarity of objectives, indicators of program development, human resource competencies, and budget planning .

Keywords: Effectivivness, Planning, Musrenbang

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 4 tujuan yang tertuang didalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dimana salah satu tujuan tersebut adalah mencapai dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dimana untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dicapai melalui pembangunan yang tepat sasaran. Dan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif dihasilkan lewat perencanaan yang efektif pula. Oleh karena itu, untuk melakukan perencanaan pembangunan tersebut dibutuhkan suatu arahan atau kebijakan pembangunan nasional yang akan mengarahkan pembangunan tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdayaguna sehingga tujuan negara,, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi dimana dalam konteks ini, organisasi tersebut adalah negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengubah atau menciptakan perubahan perubahan yang mencakup perubahan penting pada struktur sosial, sikap masyarakat, hingga peran dan sikap pemerintah.

Musrenbang Kecamatan Senapelan merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam Kecamatan Senapelan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas daerah Kabupaten/Kota di wilayah kecamatan Senapelan.

Pada Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2012, Kecamatan Senapelan dalam Musrenbang

menyepakati 12 (duabelas) usulan prioritas untuk diajukan menjadi Daftar usulan prioritas Kecamatan Senapelan untuk tahun perealisasi tahun 2013. Dimana usulan ini umumnya berisi tentang pengaspala jalan, pengadaan lampu jalan sebagai penerangan warga, peninggian turap parit sebagai cara untuk mengurangi banjir, dan juga program renovasi Kantor Lurah Sago. Namun pada tahun tahun perealisasi tahun 2013, hanya 4 (empat) usulan saja yang dapat direalisasikan, diantaranya, pembangunan Masjid, pembangunan Kantor Lurah Sago, dan pembuatan parit, peninggian turap parit, dan pembuatan *box culvert*. Hal ini membuktikan bahwa Musrenbang kecamatan Senapelan tahun 2013 kurang efektif karena tidak mampu mengakomodir seluruh usulan prioritas Kecamatan yang telah dibahas dalam Musrenbang kecamatan Senapelan.

Sedangkan pada Musrenbang Tahun 2013, Kecamatan Senapelan melalui Musrenbang Kecamatan tahun 2013 menyepakati sekitar 15 kelompok kegiatan prioritas yang terdiri atas semenisasi jalan, pengaspalan jalan, pengerjaan dan pengadaan parit, pengadaan *box culvert*, pengadaan lampu jalan, pengadaa posyandu, pengadaan ekonomi kerakyatan, pembuatan sumur bor artesis, peninggian turap, perngadaan dan perbaikan drainase, pengadaan dan rehab gedung kelas dan sekolah, pembuatan paving blok, pembinaan Pemuda/Remaja Masjid, pelatiba ibu-ibu PKK, renovasi kantor lurah. Namun pada kenyataan hanya 6 usulan saja yang dapat direalisasikan dari usulan prioritas yang disampaikan tersebut, diantaranya adalah: rehab kantor lurah, peninggian turap, pembuatan parit di dua Kelurahan, dan pengadaan lampu jalan di dua kelurahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Musrenbang Tahun 2013 tidak atau kurang efektif sama seperti tahun sebelumnya

dimana hanya ada sedikit usulan saja yang disetujui untuk direalisasikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dimana organisasi, program atau kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Hal ini dimana efektif ditekankan dari segi keberhasilannya (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id).

Efektivitas juga dapat dilihat sebagai rangkaian Input, Proses, Output dari suatu proses suatu kegiatan atau hal tertentu (eprints.uny.ac.id).

Efektivitas menurut **Handayani** (1994:16) ialah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya adalah efektif. Kemudian **Ahadi dalam Mitra** (2010:29) menyatakan bahwa efektifitas adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Selanjutnya **Sigit dalam Mitra** (2010:29) mendefenisikan efektifitas adalah suatu yang berkelanjutan yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Menurut **Nasution** (2000:68) mengatakan bahwa yang dikatakan efektif kerja adalah suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari kualitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, pemahaman dalam melakukan pekerjaan. Menurut **Sumaryadi** (2005:105) efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat

dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Sedangkan **Siagian** (2003:20) mengatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu dapat tepat pada waktunya.

2. Perencanaan

Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia dalam meminimalkan ketidakpastian. Dan perencanaan itu dapat dikatakan perencanaan yang ideal jika langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri semakin dekat dengan kehidupan manusia, sedangkan dalam arti sempit, perencanaan berarti derivat dari kemampuan *foresight* itu, yaitu, kemampuan “mengukur” (*mesuring*) **Nugroho dan Wrihatnolo** (2011:2)

Menurut **Tjokroamidjojo** dalam elisa.ugm.ac.id (2014:1) perencanaan memiliki pengertian dalam arti luas sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana seorang atau sekelompok manusia mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain hal diatas, perencanaan juga menjadi suatu penentu tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Pada umumnya, tugas perencanaan adalah “mengukur”, namun yang menjadi permasalahan adalah, tidak semua materi yang digunakan dalam pembangunan tersebut dapat diukur dengan mudah. Dan yang menjadi tugas perencanaan adalah mendefenisikan segala materi yang sulit untuk di hitung dan didefinisikan menjadi sesuatu yang dapat didefinisikan dan dapat dinyatakan dalam

proses perencanaan (**M.L. Jhingan dalam Nugroho dan Wrihatnolo 2011:3**)

Bentuk-bentuk perencanaan sedikitnya ada delapan jenis, yaitu:

- a. Perencanaan menurut jangka waktu
- b. Perencanaan menurut sifat doronganya
- c. Perencanaan menurut alokasi sumber daya
- d. Perencanaan menurut tingkat menurut keluwesan
- e. Perencanaan menurut sistem ekonomi
- f. Perencanaan menurut arus informasi
- g. Perencanaan menurut dimensi pendekatan, dan
- h. Perencanaan menurut lingkaran aktivitas pembangunan **Tri Widodo dalam Nugroho dan Wrihatnolo (2011:4)**

Menurut **B.S. Muljana (2001:4)** perencanaan pembangunan menurut jangka waktu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perencanaan jangka panjang (Perspektif), biasanya mempunyai rentang waktu antara 25 (dua puluh lima) tahun. Perencanaan jangka panjang ini dikatakan sebagai perencanaan perspektif dikarenakan jangkauannya yang melintasi beberapa tahun dimana pada umumnya perencanaan ini tertang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- b. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu atau rentang waktu antara empat sampai enam tahun.
- c. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu satu tahun. Rencana ini sering disebut sebagai rencana operasional tahunan. Perencanaan-perencanaan jangka pendek yang diterapkan di Indonesia antara lain Rencana

Pembangunan Tahunan (Repeta atau Repetada).

Pandangan diatas dapat dikatakan bahwa, perencanaan pembangunan merupakan urat nadi untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada suatu negara. Perencanaan yang matang, trukur, dan terarah akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan kemudahan terhadap evaluasi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Menurut **Jackson dan Schuler dalam Umam (2011:82)** tujuan utama dari perencanaan adalah memfasilitasi efektivitas organisasi, yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi.

3. Pembangunan

Pembangunan pada umumnya dapat didefenisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) **Sondang Siagian (2001:4)**

Bryant dan White (1987:22) mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu peningkatan untuk mempengaruhi masa depan yang mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, itu berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga yang membuat perubahan. Kedua, mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu untuk memecahbelah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentumaka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya

menjamin bahwa masa depan dapat dijunjung tinggi dan ditunjang keberlangungannya.

Sajogyo dan Pudjiwati (1995:40) menjelaskan pada dasarnya masalah pembangunan timbul karena pendekatan perencanaan nasional yang sifatnya sektoral, sehingga dibutuhkan usaha khusus ditingkat lokal untuk memadukan lagi berbagai rencana yang terpecah-pecah.

Tjokroamidjojo (1983:22) menjelaskan bahwa pembangunan adalah ikhtiar untuk mengubah masa lalu yang buruk menjadio era yang maju juga sebagai salah satu usaha yang terus menerus untuk membuat yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan adalah segi kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan itu baru berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara.

Siagian (1995:3) pembangunan sendiri punya makna sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan perencanaan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah, menuju suatu modernitas dalam rangka membina masyarakat (Nation Building).

Budiman (2002:2) berpendapat bahwa pembangunan dapat diukur dengan beberapa standar, yaitu:

- a. Kekayaan rata-rata
- b. Pemerataan
- c. Kualitas kehidupan
- d. Kerusakan lingkungan
- e. Keadilan sosial dan kesinambungan

Pandangan diatas mengungkapkan bahwa penetapan perencanaan pembangunan yang dirangkum oleh Musrenbang hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor yang memberi kontribusi yang cukup bagi masyarakat sehingga program pembangunan dapat berdayaguna bagi masyarakat selain dari pada itu pembangunan hendaknya bersifat

berkelanjutan dan adanya pemerataan dari hasil pembangunan bagi setiap lapisan masyarakat.

4. Perencanaan Pembangunan

Menurut **Tjokroamidjojo (1974:191)** Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan merealisasikannya.

Perencanaan merupakan salah satu proses dalam menentukan arah dan kebijakan suatu pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Menurut **Tjokroamidjojo (1977:54)** mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok secara umum yang meliputi:

- a. Kebijakan dasar rencana pembangunan
- b. Adanya kerangka rencana
- c. Perkiraan sumber sumber pembangunan
- d. Uraian kerangka kebijaksanaan yang konsisten
- e. Program investasi dan administrasi pembangunan

Bryant dan White(1987:315) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menurut pengertian yang sering diacu oleh istilah tersebut adalah upaya sadar untuk menunaikan beberapa diantara, kalau tidak semua tugas-tugas berikut:

- a. Mengumpulkan dan menaksirkan indikator-indikator agrerat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
- b. Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
- c. Mengidentifikasi hubungan hubungan antara sektor-sektor dalam rangka memajukan dan menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan kunci.

- d. Menunjukkan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif ke arah pembenahan masalah-masalah yang dihadapi yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu.
- e. Mengidentifikasi implikasi-implikasi pendekatan-pendekatan alternatif yaitu terhadap alokasi.
- f. Memberikan identifikasi-identifikasi alternatif beserta penjelasannya yang tegas dan rinci terhadap pembuatan keputusan tingkat tinggi yang biasanya dilakukan pada tatanan kabinet. Memaparkan implikasi alternatif berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.
- g. Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembicaraan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.
- h. Terus-menerus memantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial nasional dan memantau indikator hubungan sektoral
- i. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan pembahasan-pembahasan kebijakan berikutnya.

Berdasarkan pandangan para ahli diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan urat nadi untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada suatu negara. Perencanaan yang matang, terukur dan terarah akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, serta memberikan kemudahan evaluasi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

5. Efektivitas Program

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top-down process*.

Penyusunan rencana ini berarti bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan dengan rencana lain, yang relevan; kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga mejadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memusatkan dan memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya (Nugroho dan Wrihatnolo 2011:81)

Sedangkan menurut Mitra (2010) Efektivitas program organisasi adalah tingkat sejauh mana organisasi merealisasikan program kerjanya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan segenap sumber daya dan sarana yang ada. Salah satu hal penting yang juga menentukan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi yakni menyangkut berbagai usaha-usaha yang berkaitan dengan masalah menejerial organisasi dan anggota, terutama dalam aktivitas organisasi yang dilaksanakan oleh anggota. Dengan kata lain efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Ukuran yang dipakai untuk mengukur efektivitas program pada organisasi adalah:

1. Tujuan program
2. Struktur
3. Produktivitas
4. Sumber daya manusia

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai efektivitas, perencanaan, pembangunan, perencanaan pembangunan dan efektivitas program, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa suatu perencanaan yang efektif di pengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Struktur organisasi
2. Kualitas
3. Kwantitas
4. Waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori **Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81)** yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

a. Sistematis

Yaitu, segala usaha menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru kriteria sistematis ini

b. Terpadu

c. Transparan

d. Akuntabel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, usulan prioritas dalam Musrenbang kecamatan tidak akan semua dapat diakomodir dan direalisasikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2012 ada 11 (sebelas) usulan prioritas Kecamatan yang diusulkan ke Musrenbang tingkat Kota Pekanbaru, namun hanya ada 4 (empat) usulan yang dapat direalisasikan. Namun, tidak demikian halnya pada Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2013 dari 15 (lima belas) usulan prioritas Kecamatan Senapelan yang diusulkan ke Musrenbang tingkat Kota Pekanbaru, hanya 6 jenis kegiatan usulan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik.

Nugroho dan Wrihatnolo mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik disusun berdasarkan beberapa unsur, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun

harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

c. Transparan

Transparan, yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

1. Sistematis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Camat Senapelan, Bapak Trisepnasaputra, S.STP.,M.Si., dapat diketahui bahwa sistematika dalam penyusunan rencana dalam Musrenbang kecamatan Senapelan harus mengikuti aturan dan prosedur yang sesuai dengan *Standart Operational Procedure* (SOP) dari Musrenbang itu sendiri. Dimana pengusulan rencana itu dimulai dari tingkat RT yang pada umumnya dikenal dengan Rembuk RT kemudian di usulkan ke tingkat Kelurahan, hingga akhirnya sampai ke Musrenbang Kecamatan Senapelan. Berdasarkan sistematika tersebut dapat diketahui bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan bukan merupakan usulan prioritas yang dapat muncul dengan tiba-tiba, atau "*usulan titipan*" pihak kepentingan tertentu. Setiap usulan yang dibawa dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan merupakan usulan yang telah melalui beberapa tahap sebelumnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Lurah Sago dalam wawancara dengan penulis.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Lurah Sago, sebagai salah satu Kelurahan di Kecamatan Senapelan terkait dengan sistematika penyusunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan. Dimana melalui hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan rencana dalam Musrenbang sangat menitikberatkan sistematika dan keteraturan. Setiap usulan yang akan diakomodir harus terlebih dahulu mengikuti dan melewati pembahasan dari beberapa tahap sebelumnya. Menurut penulis, hal ini dilakukan untuk meminimalisir usulan-usulan dari sekelompok atau oknum tertentu yang hanya akan menguntungkan segelintir orang, tanpa melihat kepentingan orang banyak.

Menurut penulis, kedua pendapat diatas juga menunjukkan sifat dari

Musrenbang itu sendiri, yaitu pembangunan yang akan dilakukan yang bersifat *Bottom-Up*, yaitu pembangunan yang usulan, aspirasi dan idenya berasal dari rakyat, agar pembangunan tersebut dapat tepat sasaran, bermanfaat, dan berdaya guna bagi masyarakat.

2. Terpadu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Camat Senapelan, mengenai keterpaduan penyusunan rencana pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa semua usulan prioritas dari masyarakat dan masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan akan disesuaikan kembali dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kecamatan Senapelan, sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan SKPD atau RKP dan dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan wawancara diatas juga dapat kita lihat bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Senapelan mengenai pembangunan masih perlu dibenahi, masyarakat pada umumnya hanya melihat bahwa pembangunan merupakan hal yang bersifat fisik, seperti pembangunan gedung sekolah, pengaspalan jalan, pembuatan dan perbaikan drainase dan lain sebagainya. Masyarakat pada umumnya kurang memahami bahwa bentuk pelatihan pada ibu-ibu PKK, pelatihan kepada pemuda Karang Taruna, dan juga penyuluhan ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari pembangunan yang bersifat non fisik namun dapat meningkatkan *skill* atau keahlian.

Sebagaimana diketahui, bahwa jika Usulan prioritas dalam Musrenbang dipadukan dengan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) ataupun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maka akan diperlukan cara untuk

menyesuaikan Usulan tersebut dengan SKPD atau RKP beserta pihak PU, Bina Marga, dan Cipta Karya, dimana menurut Camat Senapelan, penyelarasan itu akan dibahas pada saat Musrenbang Kecamatan dilaksanakan, pada saat seluruh perwakilan masyarakat Kelurahan beserta Narasumber dan pembahas bersama sama membahas usulan-usulan yang akan disetujui setelah sebelumnya lembaga dan SKPD yang berkaitan telah memaparkan program dan rencana pembangunan yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Selain proses penyelebaran tersebut, dapat dilihat indikator yang akan digunakan dalam proses penyelebaran tersebut, indikator yang dimaksud adalah kesesuaian usulan dengan SKPD dan RKP lembaga yang bersangkutan,

3. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan, dimana dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2013 setiap pelaksanaan dan juga unsur beserta usulan nya di akomodir dengan sikap transparansi atau terbuka, dengan kata lain tidak ada hal yang disembunyikan dan ditutupi mulai dari usulan-usulan yang masuk, hingga biaya atau anggaran yang dibutuhkan dan disediakan bagi pembangunan yang akan berlangsung. Sikap transparansi juga dibutuhkan dalam melihat proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Senapelan sendiri. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat merasa nyaman dalam menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan yang akan direalisasikan dan diharapkan juga akan mengurangi munculnya usulan-usulan yang tiba-tiba muncul dari oknum-oknum atau pihak-pihak yang hanya ingin diuntungkan dari proses pembangunan tersebut.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Lurah Sago, dapat diketahui bahwa sikap transparan dan terbuka dalam Musrenbang ini sudah dimulai dari tahap Kelurahan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

transparansi dengan pihak Kecamatan Senapelan dan Kelurahan Sago, dapat diketahui bahwa baik dari pihak kecamatan atau kelurahan dan masyarakat masing-masing harus memiliki sikap keterbukaan, baik dari segi usulan yang akan disampaikan maupun dari anggaran yang disediakan dan dibutuhkan untuk pelaksanaan usulan tersebut. Pada hasil wawancara diatas juga dikatakan bahwa pengadaan sumur atesis sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Sago membutuhkan dana sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dikarenakan pertimbangan dan musyawarah yang telah dilakukan, akhirnya pengadaan sumur atesis tersebut dapat direalisasikan, disamping usulan masyarakat kelurahan Sago akan pengadaan kantor Lurah Sago.

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Senapelan, sikap transparansi sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan masyarakat perlu diberi kepastian dalam perealisasiian rencana pembangunan yang mereka usulkan kepada pemerintah. Dalam hal pengusulan dan penyusunan perencanaan ini juga diharpkan tidak hanya pemerintah dan pihak kecamatan Senapelan saja yang harus bersikap transparan dan terbuka, masyarakat yang mengusulkan usulan tersebut juga harus memiliki sikap terbuka dna transparan terhadap hal yang diusulkan. Sikap masyarakat yang transparan ini antara lain mendukung tim survey yang melakukan survey dan pemantauan ke lapangan, bersedia ikut dalam musyawarah dan diskusi yang akan menghasilkan perumusan usulan yang dapat dijadikan prrioritas masing-masing Kelurahan dan Kecamatan Senapelan.

Sikap transparansi tidak akan berarti jika tidak ada langkah konkret dan aks nyata dalam pelaksanaannya, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta LKM terkait dengan langkah konkrit yang telah dilakukan

dalam penyusunan rencana dan usulan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Senapelan, dapat diketahui bahwa pada Musrenbang Kecamatan Senapelan, sikap transparansi dan keterbukaan dilakukan berbagai tindakan dan aksi nyata, seperti setiap usulan yang masuk dan diakomodir disebutkan siapa pengusul dan alasan serta volume usulan yang disampaikan, mengapa usulan tersebut perlu disampaikan dan dibahas bersama dalam Musyawarah tersebut kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan terkait dengan usulan tersebut. Dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan juga tidak diizinkan munculnya usulan-usulan yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya proses pembahasan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang. Setiap usulan dipaparkan di dalam Musrenbang, jadi tidak akan ada usulan yang hanya akan menguntungkan beberapa orang saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.

Disamping itu juga, pembangunan yang akan dilaksanakan juga merupakan pembangunan yang bersifat *Bottom-Up* artinya, pembangunan itu diusulkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan keperluan masyarakat di kecamatan Senapelan itu sendiri, bukan merupakan usulan pembangunan yang datang dari pemerintah kepada masyarakat, karena pemerintah hanya fasilitator dalam Musrenbang, sedangkan yang berinisiatif akan pembangunan tersebut adalah masyarakat.

Sikap transparansi dalam Musrenbang Kecamatan ini juga didukung dengan pembahasan dan persetujuan hasil Musrenbang Kecamatan tersebut di hadapan pihak-pihak yang berwenang dalam Musrenbang kecamatan Senapelan, seperti Anggota DPRD yang mewakili Kecamatan Senapelan, Perwakilan dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kecamatan

Senapelan. Selanjutnya setelah dibahas, kemudian akan disetujui apa yang menjadi usulan Prioritas dari Kecamatan Senapelan. Untuk kemudian di usulkan dalam Musrenbang di Tingkat Kota Pekanbaru.

4. Akuntabel

Akuntabel berarti segala bentuk proses dan hasil realisasi Musrenbang Kecamatan Senapelan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mengusulkan usulan tersebut. Sikap akuntabel ini sangat dibutuhkan mengingat usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah dan SKPD yang berkaitan melalui Musyawarah. Jadi, sikap akuntabel ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan kepada masyarakat, apa prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat yang telah direalisasikan, bagaimana perealisasiannya, dan apa yang menjadi harapan pemerintah dan SKPD yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam menilai pembangunan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan informan mengenai sikap akuntabel atau pertanggungjawaban ini di dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan.

Kecamatan Senapelan sendiri pada saat Musrenbang di Tingkat Kota Pekanbaru diadakan. Dimana pada tahap ini, pihak Kecamatan akan memaparkan, mengapa Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa proses pertanggungjawaban dalam penyusunan perencanaan Musrenbang Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat setelah pembangunan yang diusulkan selesai direalisasikan namun, pertanggungjawaban dilakukan juga oleh pihak jenis pembangunan yang di prioritaskan tersebut perlu direalisasikan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan

dasar pertimbangan dari pembangunan tersebut.

Setelah pembangunan tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah pertanggungjawaban dari pihak atau lembaga yang berwenang kepada masyarakat terkait serah terima dari bentuk pembangunan yang telah dilakukan. Selanjutnya, setelah proses serah terima selesai dilakukan, maka tugas berikutnya diserahkan bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat bentuk pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam proses pertanggungjawaban ini sendiri, ada beberapa unsur atau oknum yang dilibatkan, yaitu antar lain, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kecamatan Senapelan, Dinas PU yang melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah, kantor, perbaikan drainase, dan pengaspalan jalan, Bina Marga, Cipta Karya, Ibu-Ibu PKK, Masyarakat, serta tim delegasi RT yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan perlu dilakukan karena:

- a. Musrenbang Kecamatan Senapelan merupakan wadah bagi masyarakat Kecamatan Senapelan dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang dibutuhkan
- b. Usulan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, di peroleh dari Musyawarah yang dimulai dari lapisan paling bawah dalam masyarakat, yaitu tingkat RT, jadi dalam perealisasiannya di butuhkan pertanggungjawaban, dimana pertanggungjawaban tersebut berisi usulan yang diterima dan usulan yang belum dapat diprioritaskan untuk tahun anggaran berjalan.
- c. Proses pertanggungjawaban dinilai penting untuk lebih menunjukkan dan mendukung sikap terbuka atau transparansi yang ada di Kecamatan Senapelan. Sehingga dalam Musrenbang selanjutnya, masyarakat dapat lebih nyaman dalam

menyampaikan aspirasi dan usulannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tahun 2013

Pada pokok pembahasan sebelumnya, telah dibahas bahwa dalam menyusun Perencanaan pembangunan yang efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Setelah itu, dalam pembahasan ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan itu sendiri, yaitu:

a. Masyarakat

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan masyarakat Kecamatan Senapelan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan. Keadaan masyarakat ini berpengaruh karena usulan-usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan merupakan usulan yang datang dari masyarakat dan sebelumnya telah dibahas dalam rembuk RW dan Musrenbang kelurahan masing-masing. Keadaan masyarakat ini juga mempengaruhi tidak hanya dalam proses perencanaan saja, namun juga pasca perencanaan dimana usulan prioritas telah direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat menjaga sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah melalui proses Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2013.

b. Kejelasan tujuan dan Perencanaan Anggaran

Dalam perencanaan, kejelasan tujuan memiliki peran penting dalam peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan, hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Camat Senapelan dan Lurah Sago yang telah

dilakukan sebelumnya. Dimana pada hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa kejelasan tujuan ini mempermudah setiap unsur-unsur yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan mengetahui, kemana arah dan tujuan pembangunan yang direncanakan dalam Musrenbang kecamatan Senapelan, sehingga diharapkan, setiap badan seperti Cipta Karya (perumus kebijakan pemukiman perdesaan dan perkotaan), Bina Marga (Penyelenggaraan pembuatan jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa), Dinas PU (dan badan lain yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan dapat melihat satu tujuan yang sama dan mencapai tujuan tersebut melalui program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan, seperangkat pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kecamatan Senapelan. Hal ini mempengaruhi efektivitas karena kompetensi sumber daya manusia akan menentukan rencana-rencana atau usulan prioritas yang dapat direalisasikan, bagaimana perealisasiannya rencana atau usulan prioritas tersebut, dan hal apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan rencana tersebut, sehingga diharapkan Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Senapelan dapat efektif. Namun, pada umumnya, kompetensi sumber daya manusia di kecamatan Senapelan khususnya masyarakat masih kurang dalam menyampaikan usulan yang akan di bahas dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan ini.

d. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan suatu cara, bagaimana usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan mendapat tempat

dalam proses perencanaan anggaran, agar usulan yang diterima dan disetujui dapat direalisasikan. Sebagaimana diketahui juga, bahwa usulan yang diterima dalam perencanaan anggaran merupakan usulan-usulan yang pengadaannya menyangkut kepentingan orang banyak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Lurah Sago. Dimana pada wawancara tersebut, Dari wawancara diatas, perencanaan anggaran berkaitan dengan sikap transparansi dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan. Dalam perencanaan Anggaran, akan dapat disusun setiap usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat agar mendapat tempat dalam pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun berikutnya.

Kesimpulan

Musrenbang Senapelan merupakan sebuah forum yang dipersiapkan oleh pihak kecamatan Senapelan dan difasilitasi oleh Camat Senapelan, yang berguna untuk menampung setiap aspirasi dan usula pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan Senapelan. Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa, yaitu:

1. Efektivitas Musrenbang kecamatan Senapelan tahun 2013 memiliki beberapa aturan yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. Sistematis, yaitu setiap proses perencanaan yang dilakukan dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, melalui masing-masing tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP Musrenbang Kelurahan/Kecamatan yang berlaku, dimana setiap usulan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya seperti Rembuk RT dan Musrenbang Kelurahan
 - b. Terpadu, yaitu setiap perencanaan yang telah disusun disesuaikan kembali dengan Rencana Kerja Pemerintah masing-masing SKPD

- yang bertanggungjawab, sehingga antara usulan prioritas dan RKP tidak ada yang bertolak belakang.
- c. Transparan, yaitu setiap aspek yang ada dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan terbuka dalam melaksanakan Musrenbang, dari penjabaran dan diskusi mengenai usulan hingga alasan-alasan dan tujuan diperlukannya dilakukan pembangunan tersebut.
 - d. Akuntabel, yaitu sikap tanggungjawab yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat terhadap usulan yang disampaikan kepada pihak Kecamatan Senapelan, namun juga sikap tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Senapelan dalam Musrenbang tingkat Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan, antara lain adalah:
 - a. Peran serta Masyarakat dan RT dalam mengusulkan usulan prioritas pembangunan.
 - b. Kejelasan Tujuan, dimana tujuan Musrenbang Kecamatan Senapelan yang pada awalnya merupakan untuk melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik hanya dipahami oleh masyarakat sebagai sarana pelaksana pembangunan fisik di Kecamatan Senapelan.
 - c. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang memperhatikan sektor pembangunan nonfisik dalam pengajuan usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan.
 - d. Perencanaan Anggaran dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan yang bersifat transparan yang sudah dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis mengusulkan beberapa hal yang dapat di gunakan sebagai saran, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Musrenbang, sebaiknya kecamatan Senapelan dapat mensosialisasikan Musrenbang Kecamatan itu sendiri, sehingga masyarakat tahu dan paham apa yang menjadi peran masyarakat dalam Musrenbang kecamatan tersebut.
 2. Saran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2013: Sebagaimana telah dituliskan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2013, diketahui bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Maka dari itu, penulis menyarankan agar sebelum masyarakat mengusulkan usulan yang akan di rundingkan dalam Musrenbang kecamatan Senapelan, ada baiknya dipilah dan dipilih terlebih dahulu usulan mana yang menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan untuk dapat direalisasikan, sehingga usulan yang di akan disampaikan dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Dalam menerapkan indikator program pembangunan yang diterapkan dalam Musrenbang kecamatan, sebaiknya Pihak Kecamatan Senapelan dapat melakukan bebrapa persiapan, diantaranya melakukan peninjauan kembali daerah yang dirasa perlu dilakukan pembangunan, agar pembangunan yang akan diterapkan di daerah tersebut dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Coralie dan Loise G. White. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES: Jakarta. 1987
- Muljana, B.S. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta. 2001
- Nugroho dan Wrihatnolo. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Elex Media Coputindo: Jakarta. 2011
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan; Kumpulan, Bacaan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 1995
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. PT. Gunung Agung: Jakarta. 1995
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi Revisi. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta. 2003
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta. 2001
- Siagian, Sondang. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta. 2005
- Sugiyono, Prof. DR. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung. 2013
- Sumaryadi, Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta. 2005
- Sutrisno, DR. Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana: Jakarta. 2009
- Saefullah. *Teori Organisasi*. Sinar Baru Algesindo: Yogyakarta. 2005
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Penerbit LP3ES: Jakarta. 1974
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta. 1977
- Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*. Pustaka Setia: Bandung. 2012
- Umar, Husein. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2001
- Wijaya, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. media Presindo: Yogyakarta. 2000
- Jurnal**
- ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
diunggah pada tanggal 26 september 2014
- eprints.uny.ac.id
diunggah pada tanggal 26 september 2014
- elisa.ugm.ac.id/user/archive
diunggah pada tanggal 26 september 2014
- Karya Ilmiah**
- As'ari, Hasim. *Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru (Kasus di Kecamatan Tenayan Raya Tesis, PISA, PPS, UNRI, Pekanbaru*. 2007
- Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kuala Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2009. Oleh Muhammad Yamin, Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2010
- Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Tualang) oleh Refita, Prodi Ilmu Administrasi Negara 2013

Efektifitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan CPNS di Kab. Rokan Hulu. Oleh Rani Yuli Antari, Prodi Ilmu Administrasi Negara 2012

Efektivitas Program pada Organisasi Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau. Oleh Mitra, Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2010

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Oleh Desiska Ardiyanti, Jurusan Ilmu Pemerintahan 2010

Dokumen

Data Rekap Penduduk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru bulan Januari-Desember 2013

Data hasil rapat Musrenbang Kecamatan Senapelan Tahun 2013

Daftar Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan Senapelan Tahun 2013

Buku Musrenbang Kel-Kec Tahun 2013